

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi landasan utama dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah (Arsa dan Setaiawan, 2015).

Menurut Halim (2009) didalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah *self supporting* di dalam bidang keuangan. Artinya, daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2005 SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Menurut Sularso dan Restianto (2011) rasio ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2007).

Rasio efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Rondonuwu dkk, 2015). Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak

dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Arsa dan Setiawan, 2015).

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Salah satu elemen dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP Nomor 58 tahun 2005, pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah).

Menurut Mardiasmo (2002) kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu diperlukan pemanfaatan PAD secara efektif dan efisien agar pendapatan suatu daerah dapat terpenuhi secara maksimal. Efektifitas berarti hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, sedangkan Efisiensi yaitu suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik (Kuncoro, 2004).

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Puspitasari, 2013: 6).

Penelitian tentang rasio keuangan ini telah dilakukan di Indonesia oleh beberapa peneliti, diantaranya:

NO	NAMA PENGARANG	JUDUL	KESIMPULAN
1	Arsa dan Setiawina	Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 - 2013	Hasil dari penelitian tersebut adalah derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif pada belanja modal, ketergantungan keuangan berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal, sedangkan kemadirian keuangan dan kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.
2	Martini dan Dwirandra	Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali Tahun 2009- 2013	Hasil dari penelitian tersebut adalah rasio ketergantungan, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi, rasio tingkat pembiayaan SILPA dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi

			belanja modal sedangkan rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
3	Jatitmas	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013	Hasil dari penelitian tersebut adalah rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
4	Sularso dan Restianto	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah tahun 2006 - 2009	Hasil dari penelitian tersebut adalah rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

5	Boedi	Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan	Tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Banjar dalam membiayai sendiri APBD setiap tahunnya dikategorikan cenderung rendah sekali. Walaupun efektifitas pendapatan asli daerahnya dikategorikan sangat efektif tetapi tetap tidak sebanding dengan tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
---	-------	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dibahas tentang rasio keuangan pemerintah daerah, Peneliti melakukan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rilo Jatitmas (2015) yang menggunakan tiga variabel independen yaitu, rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Penelitian ini dilakukan dengan penambahan satu variabel independen yaitu rasio ketergantungan daerah, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang rasio keuangan daerah dengan data yang diambil dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan-Departemen Keuangan tahun 2012 - 2014.

Selanjutnya hasil rasio keuangan yang telah dianalisis tersebut digunakan sebagai media pengukuran dalam menilai kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, mengukur sejauh mana kemampuan aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan motivasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diformulasikan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
2. Apakah Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
3. Apakah Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
4. Apakah Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris bahwa:

1. Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
2. Efisiensi berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
3. Rasio Efektifitas berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
4. Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, menambah pemahaman penulis tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya, memberikan sumbangan wawasan dan sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disajikan dengan sistematika penulisan untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini yang terdiri dari lima bab. Adapun pembahasan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.** Dalam bab ini dibahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, serta pembahasan atau hasil analisis data.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.